

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama satu setengah dasawarsa terakhir, berbagai riset menunjukkan Indonesia sedang mengalami stagnasi demokrasi di sana-sini. Alih-alih menuju perbaikan, berbagai riset memperlihatkan bahwa prosedur, proses, dan mekanisme politik demokrasi justru diokupasi oleh oligarki yang makin kuat (Winters, 2014); politik elektoral hanya memfasilitasi elite konservatif yang korup dan sering terlibat dalam provokasi konflik horizontal berbasis agama (Mietzner, 2012); sementara reorganisasi kekuasaan berlangsung mengikuti logika kartel untuk kepentingan berbagai kelompok elite predatorial (Hadiz and Robison, 2004), yang tak jarang didukung oleh populisme Islam (Hadiz, 2016).

Populisme Islam meminjam istilah Vedi Hadiz (Hadiz, 2016), populisme Islam ini merupakan cara singkat untuk mendefinisikan sebuah tren yang memiliki anatomi mirip dengan populisme (spesifiknya, populisme kanan), sekaligus membawa Islam sebagai identitas kelompok. Istilah populis Islam juga bisa digunakan untuk membedakan dengan Islam radikal, atau Islam politik yang bergerak di jalur politik elektoral.

Sejauh ini, populisme memiliki pola ketergantungan (*path-dependency*) pada strategi mobilisasi populer berlandaskan narasi-narasi nasionalisme dan demokrasi dalam kontestasi politik, namun pasca Pilkada terinvalidasi oleh menguatnya narasi konservatisme Islam yang digaungkan oleh gerakan populisme

Islam sayap kanan dan aliansi politiknya, kubu oposisi (Margiansyah, 2019).¹

Kecenderungan menguatnya arus gerakan kelompok muslim yang dicirikan dengan identitas politik berorientasi konservatisme keagamaan tengah menyebar di segala jenjang masyarakat muslim Indonesia, seperti yang diperlihatkan oleh gerakan dakwah Salafi. Bahkan, seperti yang disampaikan dalam riset Najib Burhani (Burhani, 2016), konservatisme agama telah masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah yang selama ini dikenal sebagai gerakan Islam moderat. Hal ini menunjukkan bahwa arus konservatisme Islam di Indonesia sudah berkembang dan hidup di tengah dinamika kehidupan keagamaan melalui atau oleh ormas keagamaan mainstream Indonesia. Selain itu kelompok konservatif juga bisa dijumpai di kalangan kelas menengah kota yang baru mengenal Islam (*new-born muslim*) (Assyaukanie, 2018).

Kajian konservatisme menyuguhkan bahwa arus konservatisme ini tidak selalu mengejawantah pada gerakan baru, tetapi bisa memberikan warna lain dalam ormas yang telah mapan, seperti dalam kasus MUI dan Muhammadiyah (Assyaukanie, 2018). Kecenderungan MUI mempersempit pemahaman keagamaan umat salah satunya disebabkan oleh semakin meningkatnya fungsi lembaga lembaga fatwa. Lembaga ini lambat laun menjadikan organisasi ulama ini semakin konservatif dan cenderung *judgmental* untuk urusan agama (Hasyim, 2015).

Beberapa pakar mengatakan bahwa konservatisme muncul sebagai *counter*

¹ Populisme berhubungan dengan polarisasi, dramatisasi, dan moralitas politik. Populisme selalu merupakan sub-tipe dari kajian politik identitas. Sebagai “ideologi yang tipis” dia bergabung dengan fragmen gagasan tambahan dari tradisi-tradisi seperti liberalisme, sosialisme dan konservatisme dengan tujuan membangun kembali masyarakat yang homogen secara budaya dan etnis, Fukuyama dalam (Ardipandanto, 2020).

dari gagasan perubahan, namun pakar lainnya beranggapan bahwa sebenarnya konservatisme dululah yang ada kemudian baru liberal globalist muncul untuk meng-*counter* konservatif (Silawa, 2019). Selain itu berbagai gerakan konservatif agama merupakan akibat dari gagalnya gagasan universalis untuk menciptakan dunia yang ideal. Oleh karena itu konservatif bisa dikatakan merupakan cara hidup konvensional,² hingga konformitas.³ (Silawa, 2019).

Dari perspektif konservatisme, sebuah ideologi yang secara umum dipahami sebagai perubahan yang berlawanan dan cenderung mempertahankan unsur-unsur tradisional yang ada dalam tatanan sosial-politik tertentu (Hamid & Ismail, 2014).⁴ Orang-orang konservatif memiliki penolakan terhadap suatu perubahan yang biasanya mereka bahasakan dengan “melestarikan atau melanggengkan” suatu “kepercayaan” (Heywood, 2003). Kelompok konservatif berusaha untuk melestarikan berbagai institusi seperti monarki, agama, pemerintahan parlementer, dan hak milik (*property right*), dengan tujuan menekankan stabilitas sosial dan kontinuitas. Lebih ekstremnya dari konservatis adalah sikap reaksioner mereka yang meninggalkan modernisme dan kembali ke “*the way things were*” atau kembali ke pondasi awal (McLean & McMillan, 2009).

Kata konservatif lekat dengan makna negatif, dikarenakan sedikit banyak penganut konservatisme mampu menjelaskan dengan sangat tepat alasan mereka

² Berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman).

³ Suatu jenis pengaruh sosial saat individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

⁴ Pada spektrum pemikiran religio-politik, konservatisme dan fundamentalisme memiliki sifat yang serupa, meskipun demikian, penulis saat ini merasa bahwa, dalam konteks Malaysia, konservatisme lebih baik menangkap mood di tanah, belum lagi konotasi yang sangat merendahkan disampaikan oleh istilah "fundamentalisme".

menentang nilai-nilai yang ada tersebut, terutama para konservatisme agama. Konservatisme di bagi menjadi beberapa kelompok antara lain konservatisme agama, fiskal, budaya dan sosial, nasional dan tradisional, dan sebagainya (Andersen & Taylor, 2006).

Kubu konservatif tidak bisa menerima bentuk demokrasi barat secara utuh, karena dalam ajaran Islam penting untuk memilih pemimpin yang seiman atau berkeyakinan yang sama, yaitu Islam (Silawa, 2019). Bentrok gagasan global dan konservatisme domestik terjadi tidak hanya pada kasus Ahok di atas maupun hanya di Indonesia. Buktinya masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh Duterte di Filipina, aparat di Brazil, India, Afrika Selatan, Republik Dominika, Iran, dan lainnya juga merupakan ketidakcocokan gagasan global dan domestik (Posner, 2014).

Noorhaidi Hasan (2009) mengatakan pengalaman masyarakat muslim Indonesia selama dua dekade terakhir mengajarkan pelajaran berharga bahwa berbagai agenda politik Islamisme justru banyak menciptakan stigma buruk kepada Islam – fanatisme dan konservatismenya,⁵ eksklusivismenya, anti-pluralismenya, rasismenya, serta yang lebih menakutkan lagi terorismenya (Priyono, 2019). Dari beberapa argumentasi tersebut menunjukkan bahwa arus Islamisme di Indonesia cenderung menguat dengan munculnya berbagai

⁵ Menurut Masdar Hilmy, Islamisme dapat dimaknai sebagai gerakan atau organisasi yang mengubah masyarakat dengan program dan ideologi yang berdasarkan teks dasar Islam. Tidak seperti istilah fundamentalisme, radikal atau terorisme, Islamisme adalah istilah dari umat atau gerakan Islam sendiri dalam mengidentifikasi dirinya. Islamisme- berbeda dengan muslim- yang artinya seseorang dengan kesadaran, mempunyai agenda aktivis yang kemudian mengidentifikasi orang lain yang berbeda ideologi dengannya. Islamisme merujuk pada politik Islam dan proses re-islamisasi. (Hilmi, Masdar *Islamism and Democracy in Indonesia, Piety and Pragmatism*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2019).

kelompok keagamaan yang memberikan corak baru dalam dinamika hubungan agama dan negara. Dalam praktiknya pasca Soeharto dan pada masa reformasi pemulihan pemilihan demokrasi menciptakan peluang mobilisasi baru untuk kelompok konservatif yang menentang kesetaraan gender dan demokrasi pluralis dan lebih menyukai perbedaan agama dan praktik hirarki kewarganegaraan. (lihat Afrianty, Robinson, and Smith-Hefner chapters, and Blackburn 2008; Brenner 2011; Robinson 2009) dalam (Hefner, 2018).

Sarjana politik Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang menjalani giliran konservatif, terutama di kalangan populasi muslimnya. Leonard Sebastian dan Andar Nurbowo, misalnya, berargumen bahwa kebangkitan kekuatan Islam konservatif memiliki konsekuensi yang dalam dan luas untuk politik Indonesia dan itu terdiri dari fenomena yang memiliki dampak jangka panjang pada masa depan Indonesia (Sebastian & Nubowo, 2019). Gejala kebangkitan Islam konservatif dapat dilihat dari adanya peningkatan level kesalehan dalam praktik Islam di kalangan Jawa Barat, bahkan di antara kelas sosial dan populasi perkotaan yang pada tahun 1955 cenderung memilih nasionalis, dan dua pemilihan terakhir telah membuktikan bahwa Jawa Barat terus menjadi provinsi konservatif di Indonesia (Lanti & Dermawan, 2019).

Konservatisme menjadi *pop-culture* dan menyebar hampir di seluruh elemen masyarakat.⁶ Tidak hanya pada kelompok yang selama ini kita sebut

⁶*Pop-culture* merupakan istilah yang diberikan oleh Ahmad Najib Burhani dalam melihat fenomena aksi bela Islam, dia melihat adanya transformasi konservatisme menjadi *pop-culture*. Kategori iman dan kafir serta sesat-menyesatkan bukan sebagai sesuatu yang tabu atau untuk wilayah tertutup dan perlu disikapi dengan hati-hati. Seperti terjadi beberapa kasus, kebencian kepada seseorang pun bisa lantas berubah menjadi festival yang menghadirkan jutaan orang. Orang yang hadir dalam Aksi Bela Islam tak semuanya didorong oleh motif politik atau

radikal, tapi juga pada organisasi semisal NU dan Muhammadiyah (Burhani, 2016). Kebencian terhadap mereka yang berbeda, gerakan anti-intelektualisme, dan sikap yang terlalu memuja simbol-simbol agama serta lupa terhadap substansi menjadi gejala umum di masyarakat. Pejabat pemerintah, akademisi, artis, dan bahkan di kehakiman serta kepolisian, orang beramai-ramai memakai celana cingkrang, memilih bekas sujud di kening, dan memiliki jenggot tebal. Jika kita pergi ke mal-mal di Jakarta, maka pengajian-pengajian dengan warna keagamaan cukup keras seperti menjadi tren (Burhani, 2016).

Kelompok konservatif Islam Indonesia saat ini berkembang, kunci gerakan FPI, MUI, dan kelompok konservatif lainnya adalah dengan mendapatkan media massa. Dengan begitu masyarakat mampu digerakkan dengan mudah dan berujung mendesak pemerintah untuk “menuruti” permintaan masyarakat. Ini dibuktikan dengan berbagai andil kelompok-kelompok tersebut dalam mempengaruhi keputusan pemerintah seperti pembatalan konser salah satu musisi Amerika, pembatalan kontes kecantikan di Jakarta tahun 2012, pelarangan penjualan minuman beralkohol, dan lain sebagainya (Hookway, 2017). Pada pihak lain juga ada figur atau lembaga yang memunculkan kontra-wacana yang oleh kalangan Indonesianis lain semacam Martin van Bruinessen, disebut sebagai gelombang konservatif (*conservative tide*) Van Bruinessen dalam (Azra, 2016).

Agama selalu menjadi sumbernya nilai-nilai tradisional. Agama sangat erat kaitannya dengan tradisi budaya sebagian dari kehidupan manusia, pandangan

ekonomi. Ada yang, seperti dikemukakan Hilman Latief, karena solidaritas ke-Islaman untuk berkumpul bersama melawan orang “kafir”. Mereka yang suka *party* dan *festival*, seperti dikemukakan Zuly Qodir, menjadikan momen ini juga sebagai tempat *party* dan festival. Karena itu, mereka sibuk mengambil foto *selfie* dan membaginya di berbagai media sosial.

konservatif, agama dan moralitas telah dilihat sebagai fondasi yang kokoh untuk perlindungan dari sistem yang ada dan cara hidup normal ketika masyarakat manusia dalam bahaya (Turaev, 2020).⁷ Selain itu Faktor agama dan keyakinan dipandang sebagai elemen ideologis yang tidak terpisahkan dari ideologi neokonservatisme modern, dan berusaha memperkuat posisinya dalam ideologis persaingan dengan menjadikan agama sebagai instrumen utama pembentukan moral politik (Turaev, 2020:6).

Fakta sejarah menunjukkan bahwa dalam serangkaian kebangkitan Islam Minangkabau itu tidak pernah lepas dari berbagai konflik dengan melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat, serta nilai-nilai yang kompleks yang melingkupinya (Sanusi, 2018), gerakan Paderi, terjadi tragedi kekerasan (radikalisme) yang mengiringinya.⁸ Selanjutnya gerakan Paderi juga berhasil memperkuat dan memperbesar pengaruh agama dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau (Rozi, 2012), dan komunitas muslim Minangkabau yang berupaya terus mendamaikan antara yang suci dan yang sekuler (Dobbin, 1974).

Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melanjutkan kajian konservatisme agama, yang menjadi fokus penelitian ini adalah konservatisme Islam ormas keagamaan berbasis lokal dalam konteks dinamika demokrasi di Sumatra Barat. Hal ini dikarenakan peneliti belum menemukan kajian yang lebih spesifik

⁷ Dalam sistem pandangan neo konservatif di Amerika Serikat budaya dan agama berada dan diakui sebagai faktor penting dalam stabilitas masyarakat

⁸ Puncaknya negosiasi adat dan Islam terjadi pada tahun 1833, golongan adat dan golongan Paderi bersatu bahu-membahu melawan Belanda. Persatuan bukan hanya dalam bentuk kekuatan saja tapi juga dalam bentuk visi yang kemudian dikenal dengan konsensus Plakat Puncak Pato di Tabek Patah Tanah Datar yang berbunyi “*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah dan syarak mangato adat mamakai*”. Ikrar ini mengikat golongan adat dan golongan Paderi yang mengakui eksistensi adat dan eksistensi agama Islam dalam pranata sosial. Kesepakatan tersebut kemudian memperkuat posisi kelembagaan agama dalam masyarakat Minang dalam (Rozi, 2012).

mengulas mengenai konservatisme Islam dalam dinamika demokrasi lokal khususnya di Sumatra Barat. Selanjutnya, Sumatra Barat memiliki corak dan karakter yang berbeda dengan daerah lainnya, dengan adanya keselarasan antara nilai budaya dan keagamaan masyarakat yang kemudian dikenal dengan *Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) tentu menarik untuk dikaji lebih mendalam.

1.2 Rumusan Masalah

Gejala praktik konservatisme agama di Sumatra Barat dapat dilihat dari agenda dan kegiatan Ormas keagamaan berbasis lokal yang selama ini aktif dalam memperjuangkan ideologinya. Gerakan kelompok konservatif ini dapat dilihat dari aspek pemikiran keagamaan yang cenderung puritan dengan semangat pemurnian keagamaan sangat dominan yang mewarnai masyarakat Kota Padang dengan jargon Kembali kepada al-Quran dan as Sunnah, pola pemikiran yang Salafi-Wahabi, bahkan cenderung konservatif (Muslim *et al.*, 2018).

Hasil penelitian dari Setara Institute menunjukkan bahwa Sumatra Barat adalah daerah yang termasuk yang rendah tingkat toleransi keagamaanya, kemudian Indeks Kota Islami (IKI) yang dilakukan oleh Maarif institute juga memosisikan Kota Padang dan Kota Padang Panjang pada posisi terbawah sebagai kota Islami.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa arus konservatisme Islam

⁹ Lihat hasil riset Indeks Kota Islami (IKI) yang dilakukan oleh Maarif Institute pada tahun 2016 menempatkan Kota Padang pada urutan ke 28 dan Kota Padang Panjang pada urutan ke 26 dari total 29 kota di Indonesia. Kemudian dari hasil riset Setara Institute pada tahun 2018 juga menempatkan Kota Padang masuk kedalam lima kota dengan nilai toleransi terendah. Indikator dalam penelitian ini tidak lain melihat bagaimana regulasi pemerintah kota dalam membuat suatu kebijakan yang cenderung diskriminatif, lalu aspek regulasi sosial adanya kecenderungan intoleransi dan demografi agama yang juga mempengaruhi serta meliputi kebebasan beragama dan keyakinan

merupakan cikal bakal menguatnya intoleransi di dalam dinamika demokratisasi yang dinamis baik dalam aktivitas politik maupun peran negara yang memiliki wewenang.

Ada beberapa faktor menguatnya gelombang konservatisme Islam. *Pertama*, arus konservatisme Islam di Sumatra Barat dimotori oleh kelompok ormas keagamaan yang semakin bergerak secara masif melakukan aksi demi aksi, sembilan Ormas Islam yang diantaranya berbasis lokal yakni Komite Penegakan Syari'at Islam (KPSI), DDII, Front Masyarakat Pembela Islam (FMPI), Libas, MMI, HTI, Fakta, MTKAAM, dan Paga Nagari juga melakukan aksi sebagai upaya pendesakan pembubaran Ahmadiyah (okezone.com, 2008). Kelompok ini yang selama ini menganggap dirinya sebagai representasi masyarakat Kota Padang dan Sumatra Barat melalui isu-isu populis dengan menolak kelompok minoritas yang dianggap tidak sejalan dengan pemahaman kelompoknya.

Kedua, pada situasi ini, adanya dinamika transnasional Islam di tengah keberadaan dua organisasi moderat NU dan Muhammadiyah, menambah arus wajah Islam yang semakin ke kanan. Kebebasan berekspresi di era reformasi juga memberikan kesempatan bagi Islam transnasional untuk berkembang di Indonesia (Kirana, 2020). Di antara arus tersebut adalah adanya konservatisme dalam MUI, perda-perda Syariah di beberapa daerah, arabisasi di beberapa sekolah-sekolah tinggi. Lebih mengherankan, arus konservatisme itu justru muncul dalam tubuh Muhammadiyah yang selama ini dianggap moderat.¹⁰ Adanya dana-dana

¹⁰ Hal ini dapat dilihat pada tahun 2018 MUI Sumatra Barat memberikan sikap tegas penolakan terhadap konsep Islam Nusantara (news.detik.com, 2018) padahal sesungguhnya mengutip cendekiawan masyhur Azyumardi Azra bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang distingtif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi dan vernakularisasi Islam universal

transnasional dari Arab Saudi dan Kuwait dalam memperkuat lembaga-lembaga Islam di Indonesia memperkuat arus kanan ini (Bruinessen, 2013).

Ketiga, peran negara yang dominan dalam memberikan ruang bagi kelompok konservatisme Islam di Sumatra Barat sehingga memberikan celah bagi kelompok ini untuk terus mengekspresikan gerakannya. Muslim konservatif cenderung percaya bahwa negara seharusnya memfasilitasi ketaatan dan penegakan hukum Islam di kehidupan sehari-hari, atau setidaknya tidak mengganggu praktiknya, terutama terkait dengan keluarga atau urusan private (Brenner, 2011).

Gejala ini dapat dilihat dari adanya penolakan dari Ormas keagamaan terhadap pembangunan Rumah Sakit Siloam, yang berujung kepada pembatalan pembangunan Rumah Sakit Siloam. Dalam orasi yang berisi penyampaian penolakan terhadap rencana pembangunan Super Blok Siloam (Rumah Sakit Kristen, Mall, Sekolah Kristen Pelita Harapan, Hotel dan sarana lainnya) oleh Lippo Group kepunyaan James T. Riady di Kota Padang Sumatra Barat.¹¹ Hasil penelitian Zulfadli dan Beni Kharisma Arrasuli juga menegaskan bahwa ormas Islam yang menolak pembangunan Rumah Sakit Siloam mengedepankan isu-isu kristenisasi dan politisasi agama (Zulfadli, 2017).

Hal ini kemudian peneliti asumsikan bahwa negara juga ikut serta dalam

dengan realitas sosial, budaya dan agama Indonesia bukan merupakan konsep yang baru apalagi menentang konsep keislaman yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa institusi MUI Sumatra Barat menampilkan respon yang cenderung konservatif terhadap suatu perubahan atau konsep yang dianggap baru.

¹¹ Orasi itu merupakan lanjutan, yang terus meluas ke sejumlah daerah di Sumatra Barat. Lalu, aksi penolakan terhadap pembangunan Super Blok Siloam tersebut dilaksanakan oleh Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) Lanjtnah Sumbar di Pusat Kota Payakumbuh (Baitulmaqdis.com, 2014).

memelihara gerakan konservatisme Islam di Sumatra Barat dengan memutuskan untuk tidak melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Siloam sesuai dengan tuntutan massa. Selanjutnya, adanya demonstrasi penolakan krematorium bagi komunitas HBT (Himpunan Bersatu Teguh di Kota Padang) pada tahun 2017 (Beritaanda.net, 2017) dari kasus ini juga mempertegas bahwa negara berperan penting dalam memelihara serta mengakomodasi gerakan kelompok konservatif dengan memutuskan untuk penundaan pelaksanaan Krematorium HBT.

Kelompok ini juga yang mengkoordinasikan dalam mobilisasi massa aksi demo 212 Jakarta,¹² mengerahkan massa sangat besar dengan menyewa bus dan menyewa dua pesawat Lion Air dan Sriwijaya. Ormas yang peneliti jelaskan sebelumnya peneliti asumsikan sebagai ormas keagamaan yang memiliki corak dan praktik yang cenderung konservatif yang memiliki perbedaan dengan ormas *mainstream* lainnya, hal ini disebabkan dari semangat atas pemurnian keagamaan dan corak klaim terhadap identitas lokal di atas identitas komunitas lainnya yang ada di Sumatra Barat.

Dikatakan konservatif karena selain berisi penguatan akidah, materi dakwah yang diajarkan kelompok ini selalu menyelipkan perasaan terancam terhadap keberadaan pihak lain yang disukai, seperti Kristen, Cina, Ahmadiyah, Syiah, dan sebagainya (Mujiburrahman, 2006). Setiap tindakan komunitas Nasrani, seperti ritual harian, kegiatan di Gereja, bangunan tempat ibadah, sekolah, penerbitan, aksi-aksi sosial, dll, dipandang sebagai bentuk ancaman,

¹² Rombongan yang berangkat di bawah komando Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) yang beranggotakan 48 ormas di bawah koordinator Irfianda Abidin memobilisasi massa untuk ikut serta di dalam rombongan Aksi Bela Islam III di Jakarta. Ormas yang terlibat ini merupakan ormas yang sama dalam penolakan Rumah Sakit Siloam, Krematorium HBT dan kasus yang bernuansa keagamaan lainnya.

apalagi jika tindakan tersebut berkualitas tinggi dan dijalankan secara profesional.

Di mata mereka tidak ada yang tulus bagi kemanusiaan dari orang dan lembaga Kristen atau agama Nasrani juga dipandang sebagai agama kolonial (Singh & Mul Khan, 2017). Respon penolakan terhadap suatu perubahan yang biasanya kelompok ini membahasakan dengan istilah melanggengkan dan melestarikan suatu konsep yang sudah ada (Heywood, 2003). Merujuk pada realita di atas, maka perlu dilakukan pendalaman terhadap konservatisme agama di Sumatra Barat dan berdasarkan dari masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik konservatisme agama melalui atau oleh ormas keagamaan di Sumatra Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mendeskripsikan praktik konservatisme agama melalui atau oleh organisasi Islam di Sumatra Barat.
- 2) Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab praktik konservatisme agama melalui atau oleh organisasi Islam di Sumatra Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian harus dapat dibedakan antara manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berguna bagi perkembangan suatu disiplin ilmu. Sedangkan manfaat praktis merupakan manfaat yang bisa diambil dari sebuah penelitian dan diterapkan pada lokasi penelitian. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta referensi bahan kajian keilmuan, khususnya dalam kajian politik Islam. Selain itu penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya konsep yang sudah ada terkait praktik konservatisme agama di tingkat lokal, akan tetapi meredefinisikan kedudukan dan *term* konservatisme agama dan relasinya dengan identitas kultural. Di samping itu, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran identitas kultural berpengaruh terhadap kapasitas dan tindakan praktik ormas keagamaan di Sumatra Barat.

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan bisa turut memberi kontribusi penting bagi pemerintah daerah dalam bentuk mewujudkan pembangunan melalui kebijakan publik yang lebih demokratis dan multikultural.

